

Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Oleh Guru PPKn Di SMP Negeri 1 Moswaren

Yuniar Wetaku¹, Ernawati Simatupang², Jusmin³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

email: Yuniarwetaku@gmail.com, ernawatisimatupang@unimudasorong.ac.id, jusmin@unimudasorong.ac.id

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran guru PPKn di SMP Negeri 1 Moswaren dalam mempengaruhi sikap siswa terhadap korupsi. Desain deskriptif penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Moswaren dengan saksi kepala sekolah, pendidik PPKn, penjaga piket sekolah, dan siswa. Strategi pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara, persepsi, dokumentasi dengan 28 narasumber, dan dokumentasi. Sementara itu, informasi yang digunakan oleh para ahli adalah informasi penting dan informasi tambahan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi yakni triangulasi peneliti, triangulasi teori, serta triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan berupa model aliran untuk mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa peran pelatih PPKn adalah menanamkan nilai-nilai permusuhan pada siswa dalam sikap dan tindakan, termasuk peran guru PPKn dalam mendorong pengenalan nilai-nilai antikorupsi. dilakukan dengan berbagai cara, antara lain guru menggunakan kegiatan observasi untuk mendorong siswa menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang berkarakter baik; guru sebagai perancang pembelajaran, guru menambahkan nilai-nilai antikorupsi pada kompetensi inti. Tentunya dalam hal ini guru menambahkan nilai-nilai antikorupsi pada materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional; Selain itu, guru merencanakan pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sangat diharapkan bagi para peneliti selanjutnya agar bersedia memberikan kontribusi penelitian terkait peran pendidik PPKn dalam menanamkan nilai-nilai permusuhan yang merendahkan martabat.

Kata Kunci: Siswa, nilai-nilai anti korupsi, dan peran guru

Abstract

The aim of this research is to find out how PPKn teachers at SMP Negeri 1 Moswaren influence students' attitudes towards corruption. A descriptive qualitative research design was used in this research. The location of this assessment was at SMP Negeri 1 Moswaren with witnesses being the school principal, PPKn educators, school package custodians, and students. The information collection strategy was carried out using interviews, perceptions, documentation with 28 sources, and documentation. Meanwhile, the information used by experts is important information and additional information. This research uses method triangulation, researcher triangulation, theory triangulation, and source triangulation to ensure the validity of the data. Meanwhile, technical data analysis uses a flow model to collect data, reduce data, present data and draw conclusions. From the results of the examination, it can be seen that the role of PPKn educators is in instilling hostile values towards inner defilement in students, including: The role of PPKn teachers in instilling anti-corruption values by providing motivation can be done in various ways, including teachers using perception activities to stimulate students to have good character so that anti-corruption values are embedded; the teacher as a learning planner, the teacher incorporates anti-corruption values into basic competencies. Of course, in this case the teacher incorporates anti-corruption values into material about the national legal and judicial system; Apart from that, teachers also plan learning so that the learning process runs appropriately. It is hoped that future scientists will really be willing to foster exploration related to the task of PPKn educators in instilling the values of hostility towards humiliation.

Keywords: Students, anti-corruption values, and the role of teachers

1. Latar Belakang

Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai penyakit sosial. Hal ini mempercepat penyebaran korupsi di berbagai sektor dan masyarakat. Pencemaran nama baik sendiri merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan penyalahgunaan kekerasan yang merugikan negara. Korupsi biasanya diselesaikan demi kemajuan individu (Achmad Asfi Burhanudin, 2019). Oleh karena itu, korupsi harus dilihat sebagai kejahatan unik yang memerlukan upaya unik untuk memberantasnya. Menanamkan dan mensosialisasikan pendidikan antikorupsi paling efektif dan strategis dilakukan di lembaga pendidikan. Pelajar dan pelajar sebagai andalan perjuangan negara, hendaknya memiliki semangat berjuang dan menghindari praktek-praktek yang merosot sejak awal, dengan keinginan untuk dapat berperan serta dalam memerangnya dan kemudian mewujudkan wawasannya di kancah publik melalui pendidikan. dalam perspektif mental dan moral (Handayani, 2009). Tujuan pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik aktif mengembangkan potensinya. Pendidikan hendaknya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia serta memenuhi segala kebutuhan saat ini. Dalam hal ini, diperlukan tenaga pendidik yang berkompoten dan berpengalaman demi keberhasilan pendidikan antikorupsi di sekolah.

Keterampilan pendidik merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang guru untuk mencapai hasil kerja yang baik dan bernilai (Rina Febriana, 2021). Berdasarkan pengaruh observasi tersebut, peneliti menyimpulkan permasalahannya adalah siswa SMP Negeri 1 Moswaren tidak menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada siswanya. Padahal, siswa adalah masa depan bangsa. Siswa masih terus melakukan perilaku koruptif seperti membolos, tidak tepat waktu, dan tidak menyelesaikan tugas. Sekolah tidak melibatkan siswa dalam melindungi botol saat istirahat dan energi ekstra. Salah satu sekolah yang menggunakan berbagai program dalam memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswanya adalah SMP Negeri 1 Moswarem. Mengingat pendapat para ahli tanggal 31-2-31/05/2023 yang dihadiri oleh para pendidik SMP Negeri 1 Moswaren khususnya guru PPKn menekankan kehandalan setiap uraiannya, siswa hendaknya jujur dalam melakukan sesuatu, hal ini tentunya sejalan dengan pendidikan. standar melawan korupsi.

Guru PPKn SMP Negeri 1 Moswaren juga mendukung pendidikan antikorupsi di sekolah dengan menambahkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum PPKn dan mendorong perilaku anti korupsi dengan berupaya

menerapkan nilai-nilai dan sikap anti korupsi. Oleh karena itu Guru tidak semata-mata berlaku bagian dalam bermanfaat penalaran pujangga wakil didiknya memarakan juga bertanggung sambut bagian dalam mengintensifkan penalaran religius beiring kandidat sosial bagian dalam penyusunan sopan santun berbantah pakai korupsi. Oleh karena itu, ulama harus memegang utama kualitas tertentu, yang menyeluruhi kewajiban, kemandirian, kejujuran, beiring kedisiplinan. Sebagai guru sumbangan ulama yang bersangkutan pakai kenaikan perubahan dan peredaran buyung menjelang menggenggam suka duka lain seumpama kewajiban kesopanan dan sosial, beiring dugaan dan ketrampilan dasar (Mutmainah dan Kamaluddin, 2019). Master menemukan penilik terdepan yang berkedudukan bagian dalam penepisan perselingkuhan menelusuri pelajaran mendagi perselingkuhan.

Adawiyah and Permana (2022) mencurahkan pelajaran kontra perselingkuhan menyimpan tiga faktor penting kira sirkulasi wakil didik, yaitu faktor kognitif, emosional, dan motorik. Dengan memasukkan etos-etos kontra perselingkuhan dekat cantrik, faktor kognitif bercadang kepada mementingkan kodrat cantrik bagian dalam merayakan dan membikin bukti yang dipelajari, serupa subjek atau citra kreatif berasal guru. Menurut Sukid et al., salah satu tujuan utama pendidikan antikorupsi di sekolah adalah untuk mendidik siswa mengenali korupsi, menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan, dan menunjukkan bagaimana korupsi dapat dikurangi. Sukidin dkk., (2022). Dalam situasi seperti ini, mahasiswa dapat dimotivasi dengan nilai-nilai antikorupsi, terutama dalam membentuk sikap dan pandangan bertindak serta mencegah pintu terbuka yang berujung pada demonstrasi kriminal pencemaran.

2. Kajian Literatur

a. Pengertian Guru

Instruktur adalah guru yang memberikan informasi berbeda kepada siswa di sekolah. Guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada siswa, sehingga selain memberikan pengetahuan tertentu, juga mengembangkan kepribadian yang lebih baik. Pendidik membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sejati mereka dengan menggunakan pengetahuan mereka. (2002, Djamarah :). Sementara itu, tidak. Guru didefinisikan sebagai pendidik profesional yang mempunyai tanggung jawab utama untuk mendidik, mengajar, melatih, menilai dan menilai siswa melalui pendidikan formal dasar dan menengah sesuai dengan Pasal 1(1) Undang-Undang Guru dan Guru tahun 2005. Pendidik yang luar biasa adalah pendidik yang ahli dalam mempelajari teknik dan ilmu pengetahuan.

Antara keduanya tercermin dalam pameran mereka pada masa perubahan pembelajaran. Guru harus mampu mengelola seluruh sumber daya kelas, termasuk ruang kelas, sekolah, iklim kelas, siswa, dan interaksi sinergisnya dalam konteks transformasi pembelajaran. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa guru perlu terampil dalam mengelola pembelajaran atau dikenal dengan manajemen kelas. Danim Sudarwan, 2015:

a. Pengertian guru PPKn

Pendidik PPKn merupakan pengajar mata pelajaran yang mempunyai kewajiban dan tugas yang besar dibandingkan dengan pengajar mata pelajaran lainnya. Peran guru PPKn adalah menumbuhkan peserta didiknya menjadi orang yang mengetahui tanggung jawab dan tugasnya sebagai warga negara yang baik. Guru PPKn harus berusaha sekuat tenaga untuk menumbuhkan sikap positif, kecerdasan tinggi, dan keterampilan yang bermanfaat pada diri siswanya. Dengan demikian, guru PPKn dapat memanfaatkan perannya sebagai teladan moral, sikap, dan pemberi semangat. (1976 Sumantri :)

Instruktur PPKn dapat mengkoordinasikan pertunjukan mulai dari materi, pemanfaatan teknik, media, aset pertunjukan dan penilaian pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKn, khususnya yang penuh perasaan, mental dan psikomotorik. Tanggung jawab guru PPKn adalah mendidik warga negara Indonesia yang baik. Djahiri Kosasih (1999) mengatakan guru PPKn mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Memajukan dan membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila serta berkepribadian dan jati diri Indonesia.
- 2) Mengembangkan masyarakat Indonesia yang sadar akan permasalahan yang dihadapi dirinya, masyarakat, dan negara serta terdidik di bidang politik, konstitusi, dan hukum
- 3) Membina kontribusi siswa (substansial dan potensial untuk pembelajaran tambahan)

Sehubungan dengan peran guru PPKn tersebut di atas, maka seorang guru PPKn harus mampu mendidik peserta didiknya yang berkepribadian positif dan melek politik. Selain itu, mereka harus mendidik peserta didik yang melek hukum, mampu berpartisipasi dalam pembangunan, dan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. hidup di arena publik.

Berdasarkan definisi di atas, penjelajah bisa mengangkat inti seperti berikut: Agar penatar PPKn bisa meraih objek berperan wakil habitat yang setia, dongeng

sangat penting kira setiap centerik menjelang mempunyai kebolehan yang diharapkan. Oleh karena itu, penatar PPKn merinaikan pertolongan penting bagian dalam berguna centerik meluaskan kesibukan dan tata krama yang bisa berupaya gunakan bagian dalam denyut sensibel setia di bagian dalam maupun di bagian luar kelas.

b. Pengertian siswa

Siswa adalah warga negara yang berupaya mengembangkan kemampuan sejatinya dengan mengembangkan pengalaman yang dapat dicapai melalui alat, jenjang, dan metode pengajaran tertentu. (Pasal 1(2) menurut Keputusan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pelajar). Siswa merupakan sumber daya terpenting dan vital pada saat proses pendidikan formal. Tanpa seorang guru, siswa dapat belajar. Lagi pula, instruktur tidak bisa mendidik tanpa siswanya. Akibatnya pendidik dan peserta didik harus saling berinteraksi pada saat pendidikan formal atau institusional, sehingga mengharuskan kehadiran peserta didik (2015: Danim Sudarwan. Dalam sistem kelas, siswa dengan segala perbedaan tersebut – seperti motivasi, bakat, niat, perhatian, keinginan, latar belakang sosial budaya dan tradisi keluarga – berkumpul.

Agar siswa dapat belajar dengan sebaik-baiknya, guru harus mengelola dan mengelola perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam pembelajaran, sulit mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan jika guru kurang memiliki ketelitian dan keterampilan dalam mengelola perbedaan potensi siswa. Perbedaan potensi yang melekat pada siswa merupakan kekuatan yang dahsyat dalam menyelenggarakan pembelajaran yang ideal, dan hal ini harus diwaspadai oleh guru. Keberagaman adalah keselarasan yang dinamis dan harmonis. (1992, Muhammad Ali :) Pasal 39 (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan khusus diberikan kepada peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan kemampuan khusus yang mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran karena sebab jasmani, emosi atau mental. . alasan atau sosial. . Pembelajaran tersebut harus sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, agar layanan pendidikan yang diberikan kepada mereka mencapai potensi maksimalnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif yang peneliti amati berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan

oleh orang atau penulis. Eksplorasi subjektif tidak menggunakan model numerik, terukur, atau PC. Pemeriksaan subjektif adalah penelitian yang ilmunya tidak melibatkan angka-angka dalam mengumpulkan informasi dan memberikan pemahaman tentang hasilnya. Dalam penelitian kualitatif, angka dapat digunakan, namun hanya memberikan informasi tambahan.

a. Strategi pengumpulan informasi

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih atau antara narasumber dengan pewawancara, disebut wawancara. Pertanyaan langsung ditanyakan kepada responden saat wawancara. Secara bersamaan, para spesialis mengumpulkan data dan informasi dengan mengarahkan pertanyaan dan balasan pada setiap tahap kepada sumber untuk mendapatkan data yang lebih jelas.

Alat yang disebut observasi digunakan untuk menganalisis dan mengamati aktivitas peneliti sebagai guru di SMP Negeri 1 Moswaren. Kegiatan tersebut berlangsung pada saat belajar mengajar. Melalui observasi ini penelitian mengetahui bagaimana partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu tujuan observasi juga untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan kajian yang telah disusun sebelumnya.

Dokumentasi mengacu pada informasi tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti.” Metode pengumpulan data yang disebut penelitian dokumenter menggunakan dokumen sebagai sumber data. Bahan-bahan yang disimpan atau dijadikan arsip, seperti buku, foto, catatan, dan lain-lain, dalam percobaan ini penulis mengarahkan kajian catatan terhadap kondisi siswa, pengaruhnya terhadap prestasi akademik siswa, dan waktu-waktu tertentu dalam sehari.

4. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan di sekolah sebagai pusat pendidikan, khususnya dalam mengembangkan perilaku anti korupsi pada seluruh siswa. Guru hendaknya dapat merangsang minat siswa terhadap pusat materi ini, sehingga mereka dapat terhindar dari cara berperilaku yang merosot.

a. Peran Guru PPKn Dalam Membudayakan Nilai-Nilai Anti Korupsi di lingkungan sekolah

Guru sebagai guru tentunya mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan. Guru sebagai penggerak kedisiplinan di sekolah dimana sekolah merupakan tempat siswa belajar. Guru berperan sebagai pendidik menjadi

gambaran, teladan dan pengenal peserta didik dan lingkungannya. Pendidikan merupakan suatu proses yang mengembangkan tiga hal dalam diri seseorang dan sekelompok orang yaitu sikap hidup, sikap hidup, dan kecakapan hidup. Peran guru kewarganegaraan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui motivasi dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu guru menggunakan fungsi perseptual untuk mendorong siswa berkarakter baik dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam diri mereka. Selain itu, guru juga memberikan ceramah inspiratif kepada siswa agar mempunyai karakter yang baik dan menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi. Dan faktor penghambat dalam memberikan motivasi kepada siswa adalah karena keberagaman siswa itu sendiri. Solusi dalam hal ini adalah guru harus mempunyai strategi dan memahami keadaan serta kebutuhan setiap siswa.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang membantu kita mengingat pentingnya manfaat kebebasan dan komitmen warga negara. Tujuan dan cita-cita bangsa harus menjadi pedoman dalam segala hal yang dilakukan, dan tidak boleh ada yang menyimpang dari harapan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang fokus pada sistem mayoritas politik dan dilengkapi dengan berbagai sumber informasi, dampak positif dari pendidikan di sekolah, masyarakat dan wali, yang semuanya ditangani untuk mempersiapkan siswa berpikir mendasar, ilmiah, bertindak, dan bertindak adil dalam menjalani kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1) Peran guru sebagai contoh atau sumber motivasi.

Para pendidik mempunyai tugas yang tulus dan bermanfaat sebagai teladan yang baik dalam menanamkan nilai-nilai yang menentang akan tindak korupsi. Selain mengarahkan siswa untuk menerapkan prinsip antikorupsi, guru juga harus menjadi teladan bagi siswanya. Tugas dan tanggung jawab seorang guru tidak hanya mencakup mengajar, tetapi juga mendidik dan membantu siswa menjadi dewasa. Pendidik hendaknya merangkul karakter yang baik karena siswa menganggap tindakan dan perilaku gurunya baik, sehingga siswa menjadikan gurunya sebagai teladan atau contoh untuk ditiru. Kepastian serupa juga disampaikan Ibu Eni, guru SMP Negeri 1 Moswareni PPKn, yakni diharapkan siswa dapat mengembangkan nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya awal pencegahan korupsi di masa depan. Sebagai guru, kita berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa dengan mendisiplinkan diri di kelas sebelum kelas dimulai, bersikap adil terhadap siswa,

bertanggung jawab atas tanggung jawab kita sebagai guru, dan menjalani gaya hidup sederhana. Pendapat lain didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Ibu Tidora Isir, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Moswaren dalam sebuah wawancara: Siswa belajar menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupannya karena guru berperan sebagai teladan penting yang menunjukkan perilaku moral kepada mereka. Guru perlu bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab setiap hari untuk menunjukkan integritas mereka.

Mengingat hasil pertemuan sebelumnya, guru mempunyai peran nyata dalam penanaman nilai-nilai anti polusi, karena guru tidak hanya membimbing siswa dalam penanaman nilai-nilai anti polusi, namun guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi siswa. Tugas dan tanggung jawab seorang guru tidak hanya mencakup mengajar, tetapi juga mengasuh dan membantu siswa menjadi dewasa. Pendidik hendaknya merangkul karakter yang baik karena siswa menganggap tindakan dan perilaku gurunya baik, sehingga siswa menjadikan gurunya sebagai panutan atau panutan untuk ditiru. Selain sebagai guru, guru juga berperan sebagai pembimbing. Guru harus memahami aspek fisik dan psikologis kepribadian siswa serta tingkat perkembangannya baik dari segi kebutuhan, kepribadian, keterampilan, dan kesehatan mental. Guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi siswa, karena siswa bertindak sesuai keinginannya.

2) Tugas pendidik sebagai inspirasi.

Berdasarkan (Kustomo, 2023). Guru dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan berbagai peran dalam memotivasi siswa untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan karakter yang baik dalam diri mereka. Misalnya, guru dapat menggunakan kegiatan persepsi untuk mendorong siswa memiliki karakter yang baik dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Guru juga menginspirasi dan memotivasi siswa. Guru pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan berbagai peran dalam mendorong siswa mengembangkan nilai-nilai antikorupsi dan karakter yang baik. Misalnya, guru dapat menggunakan kegiatan observasi untuk mendorong karakter baik pada siswa dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Guru juga memberikan dorongan kepada siswa dengan cara yang merangsang.

Sebagai inspirasi, guru SMP Negeri 1 Moswareni PPKn membimbing siswanya untuk fokus pada keikhlasan dan pengabdian dibandingkan nilai saat mengerjakan tugas dan ujian. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan

siswa pada kepercayaan dan tanggung jawab, dalam kasus siswa yang terbukti bersalah melakukan penipuan. penerimaan diberikan sebagai penurunan harga diri. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada siswa. Siswa yang tidak disiplin seperti terlambat ke sekolah atau tidak mengenakan seragam lengkap akan dikenakan sanksi oleh guru PPKn. Ketika siswa mengetahui ada teman yang mengirimkan surat izin palsu, guru meminta guru untuk melaporkannya, lalu menyembunyikan identitas pelapor. Hal ini menjadi motivasi bagi siswa untuk berani mengatakan kebenaran. perilaku anti korupsi

3) Fungsi guru sebagai fasilitator.

Guru membantu siswa dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan memberikan bahan ajar dan memanfaatkan media pembelajaran. Pada hari Jumat tanggal 22/02/2023 selaku pendidik PPKn SMP Negeri 1 Moswareni disampaikan implikasi dari pertemuan Ibu Eni sebagai berikut: Guru dapat mendidik siswa tentang korupsi dengan cara yang dapat dimengerti dan bermakna bagi siswa. kehidupan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Guru dapat menggunakan media pembelajaran dan memberikan model atau cerita orisinal untuk membantu siswa memahami konsep korupsi dll.

Nilai-ideal tabiat yang ditanamkan untuk warga pelihara serupa tingkah laku umbi kesediaan penangkalan ulah penggelapan di nanti perian dikenal pakai ideal-ideal kontroversi penggelapan. Guru PPKn berlaku penting bagian dalam menuntun cantrik mengenai eliminasi penggelapan. Salah esa kesediaan supremasi kepada memasukkan gerakan dan tata susila kontroversi penggelapan depan warga pelihara adalah pakai kursus antikorupsi. Menanamkan nilai-nilai permusuhan terhadap sikap batin adalah sebuah strategi yang bisa dijalankan sebagai upaya untuk mencegah sikap batin di kemudian hari. Pelatihan permusuhan terhadap sikap batin di sekolah merupakan tahapan penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya sifat dapat dipercaya, terus terang dan kewajiban sosial. Pendidikan antikorupsi sangat ideal karena sekolah berperan penting dalam membentuk moral dan karakter siswa. Pelatihan pertentangan terhadap kedaifan gaib di bandarsah diharapkan bisa mengenalkan karet pelajar bab bayang-bayang dan pahala meluncur berpunca laku gaib, tiru memperlihatkan menjelang mencari jalan kebajikan, moral, dan ketulusan yang diharapkan kepada menyakukan dan mendagi kedaifan gaib.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a) Tugas pendidik PPKn dalam menanamkan nilai-nilai permusuhan terhadap kekotoran batin pada siswa adalah sebagai pengajar, pengarahan, dan pengkoordinasian siswa. Upaya pendidik PPKn untuk menanamkan nilai-nilai permusuhan terhadap kekotoran batin melalui model terkoordinasi dalam mata pelajaran PPKn, model pembelajaran luar melalui latihan ekstrakurikuler dan model asimilasi, penyesuaian nilai-nilai dengan segala jenis gerakan dan iklim sekolah.
 - b) dalam menanamkan nilai-nilai anti kekotoran batin pada siswa, khususnya dalam menanamkan musuh jiwa sikap batin, khususnya dengan menggunakan metodologi yang dekat dengan rumah, serta menghubungkan mata pelajaran PKn dengan isu-isu kekotoran batin. Misalnya dengan mempelajari pendidikan karakter di kelas.
1. Berikut ini faktor pendukung dan menghambat dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa:
- a. Faktor Pendukung: Adanya kelas PKn untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap konsep anti korupsi dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
 - b. Faktor penghambat, kurangnya pemahaman siswa yang sulit memahami apa yang telah disampaikan oleh pendidik, tidak adanya fasilitas dan kerangka, (misalnya tidak adanya pembacaan materi yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri) dan terbatasnya waktu selama berlangsungnya pendidikan. dihabiskan untuk menanamkan nilai-nilai yang merendahkan martabat di sekolah.

Saran

- a) Melalui kegiatan kejujuran dan kegiatan lainnya, lembaga pendidikan khususnya SMP Negeri 1 Moswaren hendaknya mendidik siswanya untuk aktif menerapkan nilai-nilai antikorupsi dengan mengamalkan nilai-nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Contohnya seperti tidak terlambat ke sekolah, mengikuti ibadah sesuai jadwal yang telah ditentukan, melaksanakan shalat duha, zhuhur, dan tadarusan dengan tertib, serta selalu jujur dalam mengikuti ujian.
- b) Bagi setiap Kamar Pendidik dan pejabat yang berwenang (khususnya Pendidik PPKn), agar lebih fokus dalam menanamkan nilai-nilai yang merendahkan martabat, baik di dalam kelas maupun di luar ruang belajar, pendidik seharusnya mempunyai pilihan untuk memilih dan menerapkan teknik yang sesuai dengan

kebutuhan. substansi materi dan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip antikorupsi. Instruktur membimbing siswa agar mereka tidak selalu terlambat dari jadwal sekolah.

- c) Prinsip antikorupsi hendaknya diterapkan oleh pelajar di SMP Negeri reservoir Moswaren tidak semata-mata di bagian dalam genus tetapi juga bagian dalam kesibukan sehari-hari. Jadi penerapan reboisasi ideal-ideal kesebalikan terhadap kecelaan di langgar menyilakan pertumbuhan dan juga membantu bagian dalam menyuntikkan watak pelajar.

Daftar Rujukan

Buku

Alwisol. (2004). *Psikologi Kepribadian*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya*

Peningkatan. Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, cet pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 121-122. 2) A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, K

Undang-Undang

Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI (Cet. I Jakarta : Sinar Grafika, 1995),

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Seri Hukum dan Perundangan: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit SL Media.

Jurnal

Goddard, R.G., Wayne K.H., dan Woolfolk H. (2000). Collective Teacher Efficacy: Its Meaning, Measure, And Impact On Student Achievement. *American Educational Research Journal*. 37: 479–508.

Fox, J.V.D. 2012. The Self-Actualizing Teacher. *Improving College and University Teaching Journal*. 13(3): 147-148.

Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 78–95. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>

Handayani, T. (2009). Korupsi Dan Pembangunan Pendidikan Di Indonesia. *IV(2)*, 15–34. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3838>

Mutmainah, D., & Kamaluddin, K. (2019). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap Dan Kepribadian Siswa. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 44. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.673>

- Adawiyah, S. R., & Permana, H. (2022). Penerapan Nilai- Nilai Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Assa ' adah. 6(1), 960–963.
- Rina Febriana. (2021). Kompetensi Guru. Bumi Angkara.
- Sukidin, Hartanto, W., Zulianto, M., Suhrso, P., & Hudori, R. F. (2022). The Education of Anti-Corruption in Secondary School: Long-term Alternative in Preventing Corruption. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 16(1), 144–154. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.30888>
- Syaiful Bahri Djamarah, Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif,
- Kustomo, Kustomo. "Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Sekolah." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9.1 (2023).